

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Hasil penelitian sebelumnya yang relevan dalam penelitian ini digunakan untuk membantu menegaskan atas pentingnya penerapan green accounting dari berbagai sumber. Selain itu juga untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari penelitian dan faktor-faktor penting lainnya.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2021) tentang “Analisis Penerapan “Green Accounting” PT Perkebunan Nusantara Xiv (Persero) Pabrik Gula Takalar Kabupaten Takalar”. menyatakan bahwa penerapan green accounting telah dilakukan pada PT Perkebunan Nusantara, mengingat adanya kenaikan jumlah biaya yang dikeluarkan semakin meningkat untuk proses pengolahan limbah.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan Kurniawan (2022) tentang “Penerapan Akuntansi Lingkungan Badan Usaha Milik Desa Untuk Mewujudkan Green Accounting Badan Usaha Milik Desa Adijaya Lampung Tengah”. menyatakan bahwa penerapan akuntansi lingkungan telah dilakukan oleh BUMDES. Namun penerapan tersebut dimasukan ke dalam laporan RPJMD dan masih menggunakan pencatatan sederhana sekaligus belum memahami istilah akuntansi lingkungan.

Penelitian Nurafika (2019) berjudul “Analisis Penerapan Green Accounting Di PTPN III Kebun Rambutan Dan Kebun Gunung Par”. Menyatakan bahwa green accounting telah diterapkan dengan cara melaporkan biaya proses pengelolaan produk yang berimbas kepada kewajiban pihak pengelola untuk pengelolaan limbah, sehingga hal tersebut diakui dalam pos biaya umum kebun pada PTPN III.

Kemudian penelitian dari Millati (2016) dengan tentang “Akuntansi Lingkungan Sebagai Strategi Pengelolaan Lingkungan Daerah Wisata Gunung Ijen Kabupaten Banyuwangi”. Menyatakan belum adanya penerapan akuntansi lingkungan, hal ini dikarenakan pihak pengelola belum memahami tentang akuntansi lingkungan. dalam penelitian tersebut memiliki kesamaan serupa dengan penelitian yang akan dilakukan. Dikarenakan pihak pengelola memutuskan memanfaatkan daerah pegunungan untuk menjadi wisata. Sekaligus persamaan atas pengetahuan seperti pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang perlu dipahami untuk laporan keuangan lingkungan.

Dari penelitian didapat kebaruan tentang persamaan dan perbedaan atas penelitian terdahulu dengan objek penelitian yang akan dilakukan. Dimana persamaan dan perbedaan tersebut mengarah pada perlunya perhitungan dengan seksama atas pemahaman green accounting sesuai dengan kebutuhan beberapa pihak, entah itu dalam lingkup perusahaan, desa, wisata, ataupun sekedar penentuan suatu proses pengukuran terhadap investor atau pihak eternal lain, namun jika sudah berhubungan dengan pertanggungjawaban mengenai alam, tentu harus diperhatikan karena hal tersebut mempengaruhi siklus lingkungan di sekitar masyarakat yang memanfaatkannya.

## **2.2 Tinjauan Pustaka**

### **2.2.1 Triple Bottom Line**

Triple bottom line menurut Andrew Savitz yang dikutip dalam Slaper dan Hall (2011): TBL “captures the essence of sustainability by measuring the impact of an organization’s activities on the world.... including both its profitability and shareholder values and its social, human and environmental capital.”

Suatu bisnis tentu mendahulukan suatu aspek ekonomi yaitu keuntungan. Namun dengan munculnya TBL perusahaan tidak lagi memikirkan aspek keuntungan saja, melainkan dari aspek-aspek lain juga harus di perhitungkan. Teori TBL yang diciptakan oleh Elkington (1997) berfokus pada profit, planet dan people, dimana hal tersebut menciptakan bisnis yang berkelanjutan untuk lebih memperhatikan kelestarian alam sebagai sumber daya alam (SDA) dan kesejahteraan manusia sekaligus laba yang dihitung sesuai keberlangsungan hidup perusahaan. (Yanti dan Rasmini, 2015).

Demi kebaikan planet dan juga keberlangsungan bisnis semua perusahaan dan organisasi, Institute of Certified Manajemen Accountants Australia (ICMA) menginformasikan untuk setiap pebisnis menerapkan etika yang baik demi terciptanya sustainability development, dengan cara memenuhi kebutuhan hidup manusia sekaligus tidak mengganggu kebutuhan penerus generasi. Lalu menerapkan kebijakan triple bottom lines berupa finansial, sosial dan lingkungan. mengingat kondisi keuangan tidak mungkin cukup menjamin nilai perusahaan untuk tumbuh dan berkembang secara

berkelanjutan (sustainable development). Wibisono, 2007 dalam Hanifah, 2013)

### 2.2.2 Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan tujuan pembangunan nasional dengan iktikad mampu memenuhi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan program-program, tentu perlu diperhatikan mengingat indonesia juga ikut serta dalam melaksanakan program-program tersebut. Kemiskinan, kesenjangan, dan perlindungan lingkungan, secara aman dan pantas tentu menjadi hak setiap mahluk. “SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030 yang berfokus kepada lima poin yaitu people, planet, prosperity, peace, dan partnership” (Fennel & Chris 2020).

SDGs atau biasa juga disebut dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dicetuskan pada tanggal 25 September tahun 2015 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berjumlah 159 negara. dengan tujuan global yang mencangkup luas dan adanya ambisi untuk kesejahteraan dunia. Hal ini direvisi dari rencana pembangunan berkelanjutan sebelumnya yang sering disebut Millennium Development Goals (MDGs) pada tahun 2000 hingga tahun 2015. Dengan nama program baru ini, sekaligus memiliki tujuan utama baik internasional ataupun nasional hingga pelosok, tentu persamaan atas peraturan Negara Indonesia yang dicetuskan Nomor 166 Tahun 2014 perlu diterapkan. Dimana peraturan tersebut menyatakan kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan diperlukannya solusi atas penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, hingga mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak (Luthfyah, 2022).

Maka dapat disimpulkan SDGs adalah program global yang dibuat berdasarkan revisi program lama yaitu MDGs dengan tujuan global atas kesejahteraan masyarakat, dan lingkungan. Dipertegas juga oleh Alfarizi (2021) bahwa SDGs adalah salah satu proses pembentukan lapangan pekerjaan yang layak dan menyangkut kebijakan pembangunan dan mendorong kegiatan produktifitas sekaligus mengurangi angka kemiskinan.

### **2.2.3 Green Accounting**

Akuntansi hijau ini juga merupakan proses untuk mendorong proses transaksi akuntansi lainnya atau output nya lebih ramah lingkungan. hal ini bertujuan agar sasaran laporan, konsep, asumsi dan prinsip akuntansi dapat menguntungkan pihak masyarakat dan keberlangsungan kehidupan alam yang berdampingan dengan manusia. Adapun alasan kenapa akuntansi perlu dihijaukan adalah sebagai berikut:

1. Akuntansi merupakan sistem ekonomi bisnis yang memiliki peran strategis bagi perhitungan laba atau ruginya, besar atau kecilnya resiko, sekaligus memperhitungkan tanggungjawab atas apa yang dihasilkan suatu bisnis, organisasi, ataupun perusahaan.
2. Mengingat akuntansi yang hanya berfokus pada unsur penghitungan seperti asset, liabilities, ekuitas, pendapatan, cost, profit, kesuksesan dan kegagalan, dan jarang membahas peristiwa sosial dan lingkungan, padahal pilar dasar suatu transaksi yang menguntungkan atau merugikan yang dapat dihitung dengan konsep akuntansi adalah sosial dan lingkungan

Karena hal tersebut informasi yang disajikan tidak lengkap dan dapat menyesatkan pembaca, sekaligus terlihat tidak terlalu peduli dengan isu-isu sosial dan lingkungan. meninjau Kembali peran akuntan sebenarnya adalah mendorong dan membantu entitas ekonomi dalam mengelola sebaik mungkin agar ramah lingkungan. (Lako, 2014)

Tujuan akuntansi lingkungan yang sebagai sarana informasi untuk membuat keputusan manajer dalam mengelola lingkungan, baik lingkungan yang dimanfaatkan atau lingkungan yang menjadi dampak dari pemanfaatan. menjadikan akuntansi lingkungan sebagai media pertanggungjawaban di bidang lingkungan kepada stakeholder. Karena alasan tersebut diharapkan hasil penerapan akuntansi lingkungan dapat memberikan kepastian evaluasi secara transparansi oleh pihak pengelola.

#### **2.2.2.1 Alasan Penerapan Green Accounting**

Mengingat pelaksanaan green accounting yang berhubungan dengan biaya membuat keharusan suatu organisasi membedakan suatu

biaya dengan beban. Karena terkadang hal tersebut biasanya tercatat sebagai beban pada pihak manajemen yang tidak tau makna beban dan biaya itu sendiri. Mengingat kinerja lingkungan sangat penting untuk diukur agar keberhasilan perusahaan dapat tercapai (Fasua,2011).

Menurut PSAK adanya beban dikarenakan aktivitas perusahaan yang biasa sedangkan biaya adalah jumlah kas yang keluar untuk memperoleh aset saat perolehan

Walaupun Green Accounting belum memiliki peraturan pasti untuk pelaporannya, pedoman yang cukup jelas dan tegas dalam kewajiban menyampaikan informasi terkait dengan pelestarian lingkungan ini terlihat dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No.1 (Revisi Tahun 2009) tentang penyajian laporan keuangan, paragraf 14 yang singkatnya laporan tambahan seperti mengenai lingkungan hidup dan lainnya, dilaporkan terpisah dan di luar lingkup standar akuntansi keuangan.

Karena itu untuk penerapan akuntansi lingkungan perlu menggabungkan acuan Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yang dimana SAK ETAP mencantumkan penggunaannya untuk entitas tanpa akuntabilitas publik yang mencakup tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan dan penerbitan laporan keuangan bertujuan untuk umum bagi pengguna eksternal. Seperti pemilik yang tidak terbit langsung dalam pengelola usaha, kreditur dan lembaga pemeringkat kredit namun untuk acuan penyajian juga dapat dilihat melalui PSAK No.1 yang telah dijelaskan singkat sebelumnya.

#### **2.2.4 Biaya Lingkungan**

Jika berbicara dengan biaya pada faktor utama pemahaman atas akuntansi lingkungan tentu sangat patut untuk dipahami. Biaya yang berlebihan sangat tidak dianjurkan untuk dilanjutkannya dalam suatu keputusan organisasi atau pebisnis dalam penerapan akuntansi. dikarenakan faktor biaya yang dapat membuat dampak negative dan positifnya operasional

dan pemeliharaan, perlu adanya meminimalisir sesuai takaran agar dapat diinvestasikan melalui proses berteknologi hijau. Serta dapat dilakukannya perancangan Kembali produk yang dihasilkan. Hal ini diperjelas oleh Hansen dan Mowen (2003) mendefinisikan biaya lingkungan sebagai biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki kualitas lingkungan yang rusak, atau biaya-biaya untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan di masa depan.

Jika biaya yang tidak diperhatikan kasus dalam pengelolaannya. Seperti halnya perlakuan biaya yang tidak jelas, seperti kata biaya overhead suatu pabrik, tentu sangat menyulitkan pihak organisasi yang menerapkan akuntansi lingkungan dan tidak berhubungan dengan proses pembuatan produk seperti pabrik umumnya. Apalagi jika ditelusuri peran akuntansi biaya secara umum yang memiliki arti alat untuk aktivitas perencanaan dan pengendalian, serta perbaikan untuk mengambil keputusan rutin ataupun strategis. tentu perlu digolongkan dengan seksama mengingat wisata bedengan yang diteliti ini telah memanfaatkan lingkungan semurni mungkin. Dimana memiliki arti pemanfaatan produk murni alam yang dijadikan destinasi alam.(Carter, 2009)

Sedangkan Menurut EPA (1995), biaya lingkungan terbagi menjadi dua bagian, yang pertama mengarah pada biaya-biaya yang secara langsung memiliki pengaruh terhadap laba bersih suatu perusahaan dan yang kedua memasuki lingkup individu, masyarakat, dan lingkungan, dimana perusahaan tidak bertanggungjawab penuh dan tidak dapat menghitung biaya-biaya tersebut.

Biaya lingkungan yang dinyatakan efektif oleh distribusi apabila sebuah biaya lingkungan lebih besar dalam aktivitas pencegahannya, namun bila biaya lingkungan ingin dikatakan efisien pengendaliannya, maka harus di hitung rasio total biaya lingkungan terhadap biaya operasional yang lebih kecil daripada rasio total biaya lainnya. (Hansen et al, 2009)

Dari pernyataan tersebut penelitian menurut Burhany dan Suwondo (2020) menambahkan, bahwa idealnya suatu aktivitas pencegahan dan deteksi harus lebih besar daripada rasio biaya aktifitas kegagalan internal maupun eksternal, karena hal tersebut juga mempengaruhi katagori efektif pada aktivitas kegagalan. Dengan rumus biaya lingkungan individu dibagi total biaya

lingkungan, maka akan menghasilkan hasil yang akan disesuaikan dengan tabel katagori rasio biaya aktivitas pencegahan lingkungan berikut,

No	Range Rasio	Katagori	Efektifitas
1	Rasio $\leq$ 40%	Tidak ideal	Tidak Efektif
2	40% < Rasio $\leq$ 50%	Kurang Ideal	Kurang Efektif
3	Rasio > 50%	Ideal	Efektif

Sedangkan untuk tabel katagori rasio biaya aktivitas kegagalan internal dan eksternal sebagai berikut,

No	Range Rasio	Katagori	Efektifitas
1	Rasio $\geq$ 60%	Tidak ideal	Tidak Efektif
2	50% $\leq$ Rasio < 60%	Kurang Ideal	Kurang Efektif
3	Rasio < 50%	Ideal	Efektif

Sehingga dari hasil rasio tersebut dapat di tentukan juga atas berapa asumsi yang harus diperkirakan bila suatu organisasi atau perusahaan hendak menerapkan biaya lingkungan untuk kelanjutan green accounting.

Sedangkan untuk rumus rasio yang efektif dalam pengendalian lingkungannya adalah total biaya lingkungan dibagi dengan total biaya operasional. Dan idealnya rasio tersebut adalah tidak melebihi rasio biaya lainnya.

Hansen dan Mowen (2007) juga menyebutkan sebab terjadinya biaya lingkungan adalah buruknya kualitas lingkungan yang terjadi, sehingga berhubungan dengan adanya karangan, pendeteksian dan perubahan, sekaligus mencegah suatu penurunan kualitas tersebut. Karena alasan tersebutlah terdapat empat macam biaya lingkungan, sebagai berikut:

### 2.2.3.1 Biaya pencegahan

Yaitu biaya yang didapat untuk proses pencegahan atas limbah atau sampah yang didapat dari hasil produksi. Seperti strategi daur ulang, perencanaan atas kualitas.

### **2.2.3.2 Biaya deteksi**

Yaitu biaya yang didapat dari proses menentukan aktifitas produksi sesuai standar lingkungan seperti pengujian atas proses awal dan akhir produk, sekaligus pemeliharaan ketepatan waktu produksi.

### **2.2.3.3 Biaya kegagalan internal**

Yaitu biaya yang didapat atas selesainya suatu proses produksi yang menghasilkan limbah dan sampah, namun tidak di biarkan. Seperti pengerjaan ulang atau down grading.

### **2.2.3.4 Biaya kegagalan eksternal**

Yaitu biaya tidak terduga yang perlu di keluarkan setelah proses melepasnya limbah atau sampah ke lingkungan. Seperti jaminan kebersihan yang dilakukan dengan melakukan kerjasama bersama Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Dari empat macam tersebut, dapat kita identifikasi secara rinci mengenai biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan organisasi atau perusahaan. Dan dari identifikasi tersebutlah proses selanjutnya dapat dijalankan sesuai alur pemanfaatan atau pembuangan limbah tersebut. Hal ini penting karena hambatan keterbatasan akuntansi tradisional yang sering digunakan masyarakat, sekaligus tidak ada peraturan yang mengikat kuat atas akuntansi lingkungan ini, terkadang membuta masyarakat acuh tak acuh pada limbah atau sampah yang telah dihasilkan.

Menurut Burrit (2002) menyatakan pentingnya akuntansi lingkungan dalam memahami biaya diakibatkan karena meningkatnya biaya yang terkait lingkungan, penggabungan biaya lingkungan dengan pos biaya umum, alokasi biaya yang tidak tepat sebagai biaya tetap dan adanya salah perhitungan atas biaya lingkungan keseluruhan dalam pencatatan akuntansi.

Dilansir dari artikel [diction.id](https://diction.id), Nikoles (2020) menjelaskan, adanya gabungan atas pengelolaan lingkungan dan pelestarian lingkungan dalam laporan akuntansi, meliputi biaya dan keuntungan ini dapat dicontohkan



dalam penelitian Hansen dan Mowen (2009) yang menganalisis isu pelaporan biaya lingkungan atas perusahaan Amoco.

Berikut contoh laporan biaya lingkungan menurut Hansen dan Mowen (2009):

**Laporan Biaya Lingkungan Menurut Hansen dan Mowen (2009)**

<b>Thamus Corporation</b>			
<b>Laporan Biaya Lingkungan</b>			
<b>Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2008</b>			
	<b>Biaya Lingkungan</b>		<b>Persentase dari Biaya Operasional</b>
<b>Biaya pencegahan:</b>			
Pelatihan pegawai	\$ 600.000		
Desain produk	1.800.000		
Pemilihan peralatan	<u>400.000</u>	\$ 2.800.000	1.40%
<b>Biaya deteksi:</b>			
Pemeriksaan proses	\$2.400.000		
Pengembangan ukuran	<u>800.000</u>	3.200.000	1.60
<b>Biaya kegagalan internal:</b>			
Pengoperasian peralatan Polusi	\$4.000.000		
Pemeliharaan peralatan Polusi	<u>2.000.000</u>	6.000.000	3.00
<b>Biaya kegagalan eksternal:</b>			
Pembersihan danau	\$9.000.000		
Restorasi tanah	5.000.000		
Penyelesaian klaim kerusakan properti	<u>4.000.000</u>	<u>18.000.000</u>	<u>9.00</u>
<b>Total</b>		<u>\$30.000.000</u>	<u>15%</u>

## 2.2.5 Komponen Akuntansi Lingkungan

Adapun komponen tentang akuntansi lingkungan menurut Guidelines Menurut Environmental Accounting Guidelines yang diterbitkan oleh Ministry of the Environment Japan (2005) dalam Wahyudi (2014) sebagai berikut:

### 2.2.4.1 Proses dan Hasil Kegiatan Konservasi Lingkungan

Hasil dari akuntansi organisasi atau perusahaan tentunya memiliki suatu ringkasan catatan atas kegiatan, sekaligus kepuluan data yang menjelaskan berbagai proses dan kebijakan atas lingkungan.

### 2.2.4.2 Item-item yang Membentuk Dasar Akuntansi Lingkungan

1. Status organisasi atau perusahaan yang aktif dalam beroperasi
2. Petunjuk dan penerapan standar biaya lingkungan yang dihitung
3. Rincian kegiatan, perhitungan dan keuntungan hubungan lingkungan dan alam
4. Adanya laporan yang didasari oleh standar akuntansi lingkungan

5. Adanya Revisi terhadap kebijakan akuntansi lingkungan pada organisasi atau perusahaan

Dari penerapan dan pengumpulan item diatas, maka hasil yang dapat diperoleh dari akuntansi lingkungan meliputi data biaya dan keuntungan lingkungan, data yang berhubungan dengan proses perlindungan lingkungan dan program pernyataan lingkungan.

## **2.2.6 Tahapan penerapan akuntansi lingkungan adalah sebagai berikut:**

### **2.2.5.1 Identifikasi**

Akuntansi lingkungan yang belum memiliki kejelasan pasti atas konsep akuntansi mengenai identifikasi. Masih berpacu pada Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) serta Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Dimana hal ini menyangkut dengan bagian-bagian yang masih sesuai dengan akuntansi lingkungan.

Jika menurut SAK ETAP (2009) identifikasi laporan keuangan adalah adanya pengidentifikasian secara jelas pada komponen laporan, seperti pembedaan informasi lain yang dapat diulangi pada setiap halaman laporan. Seperti adanya nama entitas dan perubahan nama sejak laporan periode akhir, tanggal atau periode yang ditangkupkan sesuai komponen laporan, mata uang yang digunakan dalam pelaporan, serta pembulatan angka yang digunakan.

Namun jika menurut KDPPKL (2007) menyatakan, identifikasi merupakan kejelasan transaksi sesuai peristiwa yang dilaporkan dan dapat diukur dampak keuangan dari suatu pos saat terjadi ketidakpastian.

### **2.2.5.2 Pengakuan**

Jika berbicara pengakuan, menurut KDPPLK (2015), Pengakuan (recognition) adalah suatu aktivitas yang membentuk pos, dengan mempertimbangkan unsur definisi terkait kriteria pengakuan, seperti halnya neraca dan laporan laba rugi yang

menjadi tempat pos pengakuan berada, baik diakui dalam kata-kata ataupun sejumlah uang. Jika pos tersebut memenuhi kriteria wajib diakui, namun jika tidak maka sulit kemungkinan untuk diperbaiki, karena kebijakan akuntansi sangat ketat dalam memvariasikan. Adapun pos yang memenuhi syarat dalam wajib pengakuan:

- a. Manfaat dalam kemungkinan besar ekonomi sehubungan terhadap pos tentu mengalir pada proses perusahaan: dan
- b. Adanya nilai biaya yang diukur baik serta aktiva dapat diakui sesuai neraca. Namun jika beban diakui ke dalam laporan laba rugi dan mempengaruhi manfaat ekonomi di kemudian hari, serta kewajiban yang dapat dihitung secara valid jika terjadi kenaikan, hal ini tentu berhubungan dengan akuntansi lingkungan.

### **2.2.5.3 Pengukuran**

Pengukuran sendiri digambarkan sebagai proses pengalokasian sejumlah aktiva lancar seperti uang agar dapat diakui dan dikategorikan sesuai ketentuan seperti neraca dan laporan laba rugi. Hal ini bersangkutan dalam suatu pilihan dasar terhadap pengukuran. Seperti halnya dasar pengukuran yang terdiri dalam tingkatan dan berbagai macam gabungan yang berbeda-beda. Adapun dasar ketentuan pengukuran sebagai berikut menurut KDPPLK (2015):

- a. Biaya historis, suatu pencatatan keluarnya kas atas aktiva yang dibayar sesuai nilai wajar dari hasil memperoleh aktiva tersebut.
- b. Biaya kini, merupakan proses pembayaran sejumlah kas yang setara dengan aktiva yang diperoleh dengan seharusnya.
- c. Nilai realisasi/penyelesaian, adalah suatu perolehan dari pernyataan aktiva, dalam sejumlah kas yang dapat melalui proses penjualan sesuai aktiva yang dilepas secara normal.
- d. Nilai sekarang ini dimasukkan ke dalam kategori pernyataan aktiva yang sesuai dengan arus kas masuk yang bersih di masa depan. Serta berhubungan dengan proses pengontrolan nilai

pos sekarang dengan tujuan mendapat hasil usaha yang normal. Namun untuk biaya diukur dengan bentuk biaya histori.

#### **2.2.5.4 Penyajian**

Penyajian merupakan pengeposan suatu akun sesuai ketentuan laporan keuangan yang berkaitan dengan keadaan informasi keuangan. Menurut PSAK (Munir, 2021) menyatakan, seperti hanya pengelompokan biaya lingkungan yang disajikan sesuai jenisnya. Atau bisa dikatakan sesuai dengan naman rekening yang beda agar ketentuan alokasi pembiayaan lingkungan dapat di validkan. Hal ini diperjelas juga dalam PSAK No. 1 Tahun 2015 yang disimpulkan sebelumnya tentang penyajian terpisah faktor lingkungan. sehingga karyawan atau kelompok penting yang ikut serta dalam menyajikan laporan keuangan dapat dipermudah saat pengungkapan.

#### **2.2.5.5 Pengungkapan**

Menurut PSAK 33 ketentuan akuntansi pertambangan umum bab Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH) menyatakan adanya hal wajib yang perlu di cantumkan dalam pencatatan laporan keuangan sebagai berikut:

1. Kebijakan akuntansi sehubungan dengan:
  - a. Perlakuan akuntansi atas pembebanan biaya limbah.
  - b. Metode penyusutan prasarana pengelolaan limbah.
2. Mutasi taksiran kewajiban PLH selama satu tahun berjalan yang menunjukkan saldo awal dan akhir, penyisihan dan pengeluaran sesungguhnya.
3. Kegiatan PLH yang telah dan yang sedang berjalan dan Kewajiban bersyarat

Dari pengungkapan biaya lingkungan yang telah dilakukan, tentu akan meningkatkan nilai dari pemegang saham karena kepedulian perusahaan terhadap pelestarian lingkungan. umumnya proses pengungkapan terkadang digunakan untuk mencatat biaya

tambahan yang belum dilakukan pada pos yang di tentukan (Munir, 20001)

